

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penelitian mengenai sejarah pendidikan pada masa Orde Baru sudah cukup banyak dan berkembang. Namun, masih sangat sedikit penelitian mengenai Fuad Hassan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era orde baru. Padahal jika dilihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Fuad Hassan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berperan besar bagi pendidikan di Indonesia.

Penelitian mengenai Fuad Hassan pernah dilakukan oleh Dwi Septiwiharti pada 2009 dalam tesisnya yang berjudul "*Tinjauan filsafat atas pemikiran Fuad Hassan tentang Pendidikan*"¹ yang menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Fuad Hassan dalam perspektif filsafat. Penelitian tersebut juga mendeskripsikan beberapa struktur penting konsep pendidikan Fuad Hassan dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan masa kini. Namun, Penelitian mengenai Kebijakan Pendidikan Masa Menteri Fuad Hassan (1985-1993) belum ada khususnya dalam konteks historis. Penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Fuad Hassan dalam bidang pendidikan selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

¹ Dwi Septiwiharti, *Tinjauan filsafat atas pemikiran Fuad Hassan tentang pendidikan*, (Tesis Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2009)

dari 1985 hingga 1993, yang secara historis dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia baik masa kini dan masa yang akan datang.

Tujuan pendidikan disetiap jenjang adalah meningkatkan pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan pada tahap berikutnya yang lebih tinggi serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.² Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.³

Presiden Soeharto yang merupakan presiden pada masa Orde Baru menerapkan beberapa kebijakan pendidikan bagi keberlangsungan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pada umumnya berisikan apa yang harus dijalankan oleh lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi) untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kebijakan merupakan asas dan konsep yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu Kepemimpinan, pekerjaan, serta cara untuk bertindak. Istilah kebijakan lazim digunakan

² Paul Suparno SJ, dkk, *Reformasi Pendidikan: Sebuah Rekomendasi*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 67.

³ Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam kaitanya dengan kegiatan dan tindakan pemerintah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.⁴

Berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR tahun 1973, 1978, 1983 banyak sekali kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan yang berwujud sebagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Keputusan-keputusan, Proyek Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan dalam Sarana/Prasarana, Metode, Kurikulum, dan sebagainya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan dalam TAP-TAP tersebut.⁵

Kebijakan pendidikan yang berlangsung masa Orde Baru silih berganti sesuai dengan bergantinya setiap menteri yang menjabat. Setiap menteri Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya menemukan masalah yang berbeda dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebagai pengganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya Nugroho Notosusanto yang meninggal sebelum masa jabatannya habis membuat Fuad Hassan tidak banyak membuat perubahan besar pada tahun-tahun pertama kepemimpinannya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan Fuad sendiri tidak ingin menjadikan anak didik sebagai kelinci percobaan, seperti fenomena yang terjadi masa orde baru “ganti menteri, ganti kebijakan”.

⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (edisi revisi)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), hal. 263

⁵ Ary H. Gunawan, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 59

Mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, Nugroho Notosusanto yaitu pemberlakuan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) Fuad Hassan lebih memilih sikap meredam polemik tersebut. Fuad memilih untuk tidak banyak mengeluarkan pernyataan mengenai kebijakan tersebut, Fuad cenderung memilih berkonsentrasi bagi penuntasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan menjadi dasar Sistem Pendidikan Nasional.⁶ Segala unsur pendidikan yang terkait perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) serta semua peraturan pelaksanaannya, termasuk dalam penyempurnaan kurikulum 1984. Penyempurnaan dan penyesuaian kurikulum ini diharapkan sebagai upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan isi kurikulum sebagai rancangan dalam Kurikulum 1994. Dalam kurikulum 1994 inilah Pelajaran PSPB yang sempat menuai kritik dihapuskan dan diintegrasikan kembali ke materi Sejarah Nasional dan PMP.⁷ Hal tersebut merupakan bentuk jalan tengah yang dapat ditempuh oleh Fuad Hassan untuk mengurangi kontroversi yang ada di masyarakat.⁸

Fuad Hassan melakukan beberapa perubahan pada jenjang Perguruan Tinggi. Perubahan pola seleksi masuk perguruan di Indonesia yang dilakukan pada era Fuad Hasan cukup signifikan perubahannya dibandingkan dengan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun

⁶ Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal. 76.

⁷ *Ibid.*, hal. 13

⁸ *Ibid.*, hal. 74

1983-1989. Sebelumnya pola seleksi Perguruan Tinggi dinamakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). Di samping menerima calon mahasiswa lewat tes tertulis juga ada penerimaan mahasiswa tanpa tes yang dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Keahlian (PMDK). Seleksi penerimaan mahasiswa melalui PMDK dianggap kurang adil karena penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut tidak berlaku untuk semua perguruan tinggi di Indonesia. Dengan alasan tersebut serta adanya sejumlah alasan lainnya, maka pada tahun 1989 seleksi masuk perguruan Tinggi Sipenmaru dan PMDK diganti dengan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Kebijakan Fuad Hassan dalam perguruan tinggi lainnya adalah perubahan penamaan gelar kesarjanaan, terutama untuk gelar sarjana strata

1. Perubahan nama gelar ini berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 mengenai Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi. Kebijakan Fuad ini sekaligus mengakhiri pemakaian gelar doktorandus (Drs.) dan gelar doktoranda (Dra.) serta gelar insinyur (Ir). Gelar-gelar tersebut telah digunakan sejak zaman kolonial Belanda dan berlaku untuk berbagai bidang ilmu dari penyandang gelar tersebut. Gelar "Drs." atau "Dra." bisa saja dipakai oleh sarjana sejarah, geografi, arkeologi, bahasa atau sastra, sarjana politik, sosiologi, filsafat, dan lain-lain. Gelar "Ir." juga dipakai oleh sarjana berbagai bidang ilmu, mulai dari teknik, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Pemakaian

gelar ini diganti dengan menyebutkan sarjana di depan bidang ilmu yang disandang, namun berdasarkan kelompok bidang/rumpun ilmu.

Pada tahun 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur bagi mahasiswa yang ingin aktif dalam kampus. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan mencabut secara formal kebijakan NKK/BKK pada masa Daoed Joesoef dan menggantinya dengan Surat Keputusan Menteri P & K Nomor 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK). Alasan pemerintah mengeluarkan SK Nomor 0457 untuk memberikan wadah bagi mahasiswa yang selalu menuntut dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa (Dema). Pemerintah melalui Menteri P dan K Fuad Hassan mempersilahkan mahasiswa untuk terus bergerak, tetapi jangan menggunakan kata Dema karena organisasi tersebut telah dibekukan. Sebagai penggantinya, pemerintah menawarkan konsep SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dengan dikukuhkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990. Dalam aturan ini, satu-satunya organisasi yang diakui yaitu SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi). Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi mulai diberlakukan pada 28 Juli 1990.

Fuad Hassan lahir di Semarang pada tanggal 26 Juni 1929, anak kedua dari empat bersaudara ini menghabiskan masa SD hingga SMA nya di kota Solo. Dari kecil menyukai seni yang memang menurun dari sang ayah Ahmad Hassan, yang merupakan pemain mandolin.

Pada tahun 1950 Fuad Hassan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tes masuk sekolah musik di Roma, Italia. Tapi niat itu dibatalkan karena pengaruh temannya. Fuad memperhatikan orang-orang yang memiliki bakat musik pada masa itu tidak ada yang menghargai. Hal tersebut membuatnya mengurungkan niat menjadi musikus profesional. Akhirnya Fuad tidak jadi ke Roma. Dia memilih masuk Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1950.⁹ Pendidikan sarjananya diselesaikannya pada tahun 1958, dan melanjutkan gelar S2 nya dengan mendalami filsafat pada Fakultas Psikologi dan Filsafat Universitas Toronto, Kanada. Studi Magister itu dia selesaikan pada tahun 1962. Gelar Doktorat diperoleh pada tahun 1967 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Sebelum menjabat sebagai menteri P dan K Fuad memiliki serangkaian karir yang panjang. Sebagian diantaranya berhubungan dengan dunia pendidikan. Sebagai lulusan Psikologi Fuad Hassan mengawali karir sebagai asisten pada Balai Psikoteknik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1952-1956. Kemudian menjadi Asisten dosen Jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran UI tahun 1956-1958. Selain dosen di Fakultas Psikologi UI, Fuad juga mengajar menjadi dosen Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad), Sekolah Komando Angkatan Laut (Seskoal), dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1966-1976. Beliau pernah dipercaya menjabat Duta Besar RI

⁹ Sri Indera Gayatri dkk, *Sejarah Pemikiran Indonesia III (Lanjutan) 1967 – 1998*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah Dan Purbakala Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, 2009), hal. 162

untuk Mesir tahun 1976-1980. Pada Tahun 1980-1985 menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Luar Negeri.¹⁰ Pada masa pemerintahan Soeharto, Fuad Hassan dua kali dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada periode kabinet Karya Pembangunan IV (1985-1988) dan Kabinet Karya Pembangunan V (1988-1993).

Fuad Hassan yang seorang Psikolog dan begitu mencintai seni sangat tertarik dengan masalah pendidikan, menurutnya pendidikan dan kebudayaan itu amat penting terutama untuk menghasilkan generasi-generasi baru yang berkualitas baik.¹¹ Kebijakan-kebijakan Fuad Hassan dalam bidang pendidikan berperan besar bagi pendidikan di Indonesia dan masih diterapkan sampai hari ini. Karena hal itu tema ini menarik untuk diteliti dan dipahami secara mendalam. Penelitian ini penting bagi pembelajaran sejarah selain menambah wawasan mengenai sejarah pendidikan khususnya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan pada masa orde baru, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mata kuliah Sejarah Pendidikan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Penulisan ini perlu adanya pembatasan penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan, Pembatasan perlu dilakukan agar penelitian dapat

¹⁰ *Ibid.*, hal. 162

¹¹ *Ibid.*, hal. 158

lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada permasalahan-permasalahan lainnya. berdasarkan uraian di atas penelitian ini berfokus pada Kebijakan Fuad Hassan dalam Pendidikan Indonesia selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 1985 hingga 1993. Pertimbangannya adalah pada tahun 1985 Fuad Hassan resmi diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam era Kabinet Pembangunan IV menggantikan Prof Dr Nugroho Notosusanto yang meninggal dunia. Sedangkan tahun 1993 merupakan tahun terakhir Fuad Hassan menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir Kabinet Pembangunan V.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Dasar Pemikiran yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kontribusi Fuad Hassan dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan?
2. Bagaimana arah kebijakan pendidikan pada masa Fuad Hassan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Fuad Hassan mengenai Pendidikan Indonesia selama menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1985-1993). Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi. Secara teoritik meskipun tidak melahirkan teori baru, tetapi diharapkan penelitian ini dapat memperkaya tema - tema kajian Sejarah Pendidikan khususnya pada masa Orde Baru.

Sedangkan secara praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan kajian mengenai pendidikan di Indonesia, khususnya kajian mengenai sejarah pendidikan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat berbagai kebijakan pendidikan Indonesia. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam kajian Sejarah Pendidikan khususnya pendidikan masa masa Orde Baru.

D. Metode Penelitian dan Sumber Bahan

Ilmu Sejarah seperti ilmu-ilmu lainnya mempunyai unsur yang merupakan alat untuk mengorganisasi seluruh tubuh pengetahuannya serta restrukturisasi pikiran, yaitu metode sejarah.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menekankan studi kepustakaan. Metode sejarah, merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis

¹² Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia, 1992), hal. ix

rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh, baik secara lisan maupun tulisan dan merekonstruksikan secara imajinatif berdasarkan data yang ada.¹³

Kebenaran sejarah terkait pada penalaran yang berdasar pada fakta yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkapkan sejarah secara objektif. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan – tahapan penulisan sesuai yang dijelaskan oleh Louis Gottschalk, sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik dapat diartikan sebagai pencarian atau pengumpulan sumber – sumber sejarah. Penelitian ini berusaha mencari sumber – sumber yang berkaitan dengan Kebijakan-kebijakan Fuad Hassan mengenai Pendidikan selama menjabat sebagai menteri pendidikan pada tahun 1985-1993. Tahapan ini adalah tahapan pengumpulan data atau kepustakaan sejarah yang relevan dengan objek yang diteliti. Sumber yang dapat digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (saksi

¹³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 39

pandangan-mata).¹⁴ Sedangkan, sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.¹⁵

Sumber-sumber sejarah yang digunakan sebagai bahan penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder yang didapat dari buku-buku, serta arsip yang berhubungan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Fuad Hassan. Adapun, sumber primer yang digunakan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun keempat (REPELITA IV) 1984/1985-1988/1989
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun kelima (REPELITA V) 1989/90-1993/94
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0457/O/1990 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

¹⁴ *Ibid.*, hal. 43

¹⁵ *Ibid.*, hal. 39

- SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
- Surat Kabar *Tempo* terbitan 3 Agustus 1985

Selain menggunakan sumber primer, penelitian ini menggunakan sumber sekunder. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku yang secara umum maupun spesifik yang berhubungan dengan tema penelitian ini, baik buku mengenai sejarah pendidikan pada masa orde baru maupun mengenai metode penelitian sejarah. Digunakan pula buku – buku hasil karangan Fuad Hassan mengenai Pendidikan dan Kebudayaan, seperti *Renungan Budaya, Heteronomia: Kumpulan Karangan, Studium Generale, Cultural Dimension and Human Development*.

Kajian pustaka yang penulis gunakan dapat dari beberapa tempat sebagai berikut: Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, Ruang Baca Prodi Pendidikan Sejarah UNJ, Perpustakaan Universitas Indonesia.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah mengetahui dengan baik topik dan sumber, tahap berikutnya ialah Verifikasi, atau kritik sejarah atau keabsahan sumber guna mengetahui apakah data akurat atau tidak baik segi bentuk maupun isinya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Verifikasi terdiri atas ada dua macam yaitu melakukan kritik ekstern (otentisitas) dan kritik intern (kredibilitas).¹⁶ tahap verifikasi atau kritik digunakan untuk memperoleh keabsahan sumber, dalam hal ini, dilakukan uji keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik eksternal dan kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik internal.¹⁷ Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian dari suatu sumber yang meliputi penelitian terhadap sumber, tanggal, waktu dan siapa pengarangnya. Sedangkan, kritik intern, bertujuan untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber dan dokumen sejarah yang meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah. Sumber tersebut dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji.

Penelitian ini perlu menyeleksi data-data yang berhubungan dengan Fuad Hassan selama menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti Arsip dan dokumen yang ditemukan di

¹⁶*Ibid.*, hal. 95 - 112

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 68

ANRI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta perpustakaan Nasional, maka kritik ekstern untuk membuktikan keaslian sumber pada sumber arsip relatif tidak diragukan lagi. Kritik ekstern dilakukan untuk sumber – sumber yang digunakan seperti surat kabar dan buku dengan memperhatikan tanggal, waktu dan siapa pembuat/pengarangnya.

Selain itu, peneliti membuktikan kredibilitas sumber melalui kritik intern apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya. Hal yang paling utama dalam melakukan kritik internal adalah mengecek relevansi dari berbagai sumber yang dianggap memiliki keterhubungan dengan kebijakan-kebijakan Fuad Hassan mengenai pendidikan dan kondisi pendidikan Indonesia dari tahun 1985 hingga 1993. Dengan menggunakan dua kritik tersebut penulis mendapatkan fakta-fakta sejarah.

c. Interpretasi

Interpretasi atau disebut penafsiran, setelah menyeleksi sejauh mana kebenaran, keabsahan suatu data. Maka, didapatkan fakta yang kemudian diinterpretasikan. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan sumber yang terdapat di Arsip Nasional Indonesia (ANRI) dengan beberapa surat kabar yang beredar pada saat itu dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Terdapat dua macam interpretasi, yaitu analisis dan sintesis. Interpretasi analisis berarti menguraikan sedangkan, interpretasi

sintesis berarti menyatukan.¹⁸ Tahap ini penulis berupaya menganalisis peristiwa sejarah sesuai dengan data yang telah terkumpul dengan tujuan agar dapat menguasai bahasan atau masalah yang dibahas. Selanjutnya penulis mengadakan sintesis sebagai penyatuan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. Dimaksudkan untuk mencari runtutan peristiwa sejarah sehingga menjadikan rangkaian cerita sejarah yang tidak terputus.

d. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Historiografi dapat diartikan rekonstruksi yang imajinasi daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh berbagai proses.¹⁹ Historiografi juga sering disebut penulisan sejarah. Penelitian ini disajikan menggunakan deskriptif naratif yaitu penulisan sejarah yang disusun berdasarkan kronologis peristiwa dengan memperhatikan sebab – akibat (kausasi) pada peristiwa

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hal. 78 - 79

¹⁹ Louis Gottschalk, *Op.Cit.*, hal. 39